



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pilangkenceng**, berkedudukan di Desa Kenongorejo, Kec.Pilangkenceng, Kab.Madiun, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Enggar Prasta Oktandi, berkedudukan di Ds.Jiwan, RT.14, RW.04, Kec. Jiwan, Kab. Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :B.189/KC-XVI/MKR/7/2022, tertanggal 4 Juli 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: Penggugat ;

Lawan:

1. **Sutikno**, berkedudukan di Ds.Tulung, RT.09,RW.01, Kec.Saradan, Kab. Madiun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: Tergugat ;
2. **Sri Ani**, berkedudukan di Ds.Tulung, RT.09,RW.01, Kec.Saradan, Kab. Madiun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 4 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun tanggal 11 Juli 2022 dengan Register Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN.Mjy ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN.Mjy., tertanggal 11 Juli 2022, tentang penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN.Mjy, tertanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang.;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat mencabut surat gugatannya dengan alasan ingin memperbaiki formalitas dari surat gugatan.;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mjy.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum adanya jawab-jinawab, maka pencabutan dari Penggugat tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawan (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum lainnya maka beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara hingga pernyataan dicabutnya gugatan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, ATK (alat tulis kantor), redaksi dan materai penetapan.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun, dengan Register Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN.Mjy., dicabut oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kab. Madiun atau Wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register/ daftar perkara perdata tentang pencabutan gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN.Mjy. ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh Cindar Bumi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun, Nomor

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mjy.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G.S/2022/PN.Mjy., tanggal 11 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Minto Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.;

Panitera Pengganti,

Hakim.

Minto Sutrisno, S.H.

Cindar Bumi, S.H. M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
- Biaya relaas panggilan dan PNBP : Rp 360.000,00
- Biaya redaksi putusan : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).